

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andriani, Helmina dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Nugrahani, F., & M, Hum. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books.
- Samsu, S. (2017). Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development). Jambi: Pusat Studi dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Walidin Warul., Saifullah., dan Tabrani. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Azhar, A. E. (2015). Manajemen Strategi. Deepublish.
- BS, D. A. (2020). Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM. Bintang Pustaka Madani.
- Habeis, M. (2014). Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi. PT. Elex Media Komputindo.

Jurnal :

Asrori, M. (2013). Pengertian, tujuan dan ruang lingkup strategi pembelajaran.
Madrasah Vol. 5, No. 2.

Camelia Fanny Sitepu, H. (2018). Perkembangan Ekonomi Koperasi di
Indonesia. NIAGAWAN Vol 7.

Fitri Insani, B. B. (2021). Zona Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) Pengolah Makanan di Kota Bekasi. (Jurnal
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan), 61-76.

Prasetyowati, E. &. (2016). Penilaian kinerja keuangan koperasi pada Dinas
Koperasi dan UMKM Pamekasan dengan k-means. Jurnal
Simantec, 5(2).

Purnamasari, H. &. (2020). Implementasi Program Pengembangan
Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan
Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten
Karawang. . Jurnal Politikom Indonesiana, 5(1), 85-98.

Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2020). Implementasi Program Pengembangan
Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan
Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten
Karawang. Jurnal Politikom Indonesiana.

Putri Hermayani, M. A. (2022). Analisis Strategi Kualitas Kelembagaan
Koperasi Pada Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara . Jurnal
Multidisiplin Dehasen (MUDE), 51-54.

Putri Hermayani, M. A. (2022). Analisis Strategi Kualitas Kelembagaan
Koperasi Pada Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara . Jurnal
Multi Disiplin Dehasen (MUDE), 51-54.

- Putri, E. H. (2017). Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di kota Samarinda (studi pada dinas koperasi dan umkm kota Samarinda). *eJournal Administrasi Negara*, Volume 5 , Nomor 1 , 5431 - 5445.
- Rizki, M. (2021). Dampak Program Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan di Tengan Pandemi Covid-19. *Jurnal Good Governance* Volume 17 No. 2, September 2021.
- Salmiah, N. N. (2018). Pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM: Survey pada UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 194-204.
- Sayidah, N. M. (2015). Implementasi Konsep New Public Management Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 12(1), 39-52.
- Siregar, A. P. (2020). Kinerja Koperasi Di Indonesia. *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, 31-38.
- Syahputra, F. L. (2018). Analisis struktur dan distribusi pendapatan rumah tangga serta tingkat kesejahteraan anggota koperasi serba usaha peternak motivasi doa ikhtiar tawakkal (ksup mdit) di kecamatan gisting kabupaten tanggamus. *JIIA, VOLUME 6, No. 1*, 95-102.
- Yuan Arsinta, W. (2018). Strategi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pada Dinas Koperasi Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, 251-264.

Produk Hukum :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perekonomian Kelembagaan Indonesia

Peraturan Wali Kota Nomer 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Koperasi

Situs Web :

Situs Web Resmi Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

<https://nik.depkop.go.id/>

Situs Web Resmi Badan Pusat Statistic

<https://www.bps.go.id/>

Situs Web Resmi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

<https://dkukm.bekasikota.go.id/>

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Keputusan Dekan (Penetapan Bimbingan Skripsi)

SK Perpanjangan I



UNIVERSITAS ISLAM "45"
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI
NOMOR SK : 078/SK/FISIP-A.3.2.2/IV/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PADA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

Menimbang : 1. Bahwa pada akhir masa pendidikan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi diwajibkan membuat Skripsi/Tugas Akhir
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan Skripsi, maka diperlukan pembimbing Skripsi/Tugas Akhir
3. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat menjadi Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. SK Rektor UNISMA Nomor 011/SK/UNISMA/RT/II/2006 tentang Pemberlakuan Statuta UNISMA tanggal 01 Februari 2006
4. SK Rektor UNISMA Nomor 128/SK/UNISMA/RT/K/VIII/2005 tentang Kurikulum

Memperhatikan : 1. Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi
2. Rapat Koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 23 September 2010

MEMUTUSKAN

Pertama : Mengangkat Saudara Adi Susila, Drs.,M.Si.
sebagai Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa

N a m a : Reski Rama Deni
N P M : 41183522170030
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (SI)
Judul Skripsi : Implementasi Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi di Kota Bekasi.

Ketiga : Penulisan Skripsi/Tugas Akhir berlaku sampai dengan 30 Agustus 2023, bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengganti judul Skripsi / Tugas Akhir

Keempat : Pembayaran bimbingan Skripsi/Tugas Akhir berlaku sampai dengan 30 Agustus 2023 bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya bimbingan skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 23 April 2023
Dekan
Adi Susila, Drs.,M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua program Studi Ilmu Administrasi Negara
2. Direktur DALA UNISMA
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 2 – Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 - Surat Perizinan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM "45"
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

Nomor : 054/FISIP-1/C.3.2/XII/2022
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara
dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.
di-
Tempat

Assalamu'alaikum wR.wB.

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, kami hadapkan mahasiswa kami :

Nama : Reski Rama Deni
NPM : 41183522170030
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (S1)
Nomor Telpn/Hp : 02115523912
Pembimbing : Adi Susila, Drs., M.Si.

Mohon kiranya diizinkan untuk melakukan Observasi, wawancara dan pencarian data di bidang Ilmu Administrasi Negara pada lembaga/kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun Rencana judul penelitian skripsi yaitu :

"Implementasi Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi di Kota Bekasi".

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wR. Wb

Bekasi, 16 Desember 2022


Yanto Supriyanto, Drs., M.Si.

Lampiran 4 – Surat Balasan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi

 **PEMERINTAH KOTA BEKASI**
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Jend. A. Yani No.1 (Lantai 9) KodePos : 17141
B E K A S I

Bekasi, 13 Desember 2022

Nomor : 423.5 / 4769 / DISKOPUKM.Set
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Rekomendasi.

Kepada,
Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bekasi
di-
Bekasi

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam "45" Nomor : 022/FISIP-1/C.3.2/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 Hal. Permohonan Izin Penelitian, atas nama:

Nama : Reski Rama Deni
N P M : 41183522170030
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (S-1)

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan mahasiswa tersebut melakukan kegiatan riset/Penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Sehubungan hal tersebut kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Demikian surat permohonan rekomendasi ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.


**KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BEKASI**
YAYAN YULIANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690519 199009 1 003

Tembusan :
Yth. 1. Plt. Wali Kota Bekasi (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Lampiran 5 – Surat Balasan dari Kesbanpol



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, Gedung 10, Lt. 2
 BEKASI

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 070/ 4438 -Kesbangpol.Poldagri

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/ Kep.450-Org/VIII/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
 3. Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Nomor : 423.5/ 4769/ DISKOPUKM.SET tanggal 13 Desember 2022 Perihal Permohonan Rekomendasi

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi

Menerangkan bahwa :

a. Nama/ NPM/NIS/NIM/NIK	: RESKI RAMA DENI/ 41183522170030
b. Nomor Telepon/ Email	: 02115523912/-
c. Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara (S-1)
d. Nama/Alamat Universitas	: Universitas Islam 45 Bekasi, Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
e. Peserta	: 1 (satu) Orang
f. Maksud	: Izin Penelitian/Observasi, Wawancara & Pencarian Data
g. Keperluan	: Melaksanakan penelitian/ Observasi dalam rangka penulisan tesis dengan judul : " Implementasi Strategi Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi di Kota Bekasi".
h. Lokasi	: Kota Bekasi
i. Instansi yang dituju	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bekasi

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memfasilitasi kegiatan ini.
 3. Surat keterangan ini berlaku dari tanggal **20 Desember 2022 s.d 20 Maret 2023** dan melaporkan hasilnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
 4. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bekasi, 20 Desember 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI,


CECEP SUHERLAN, SE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630328 198503 1 0090

Tembusan :

Yth. 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bekasi;
 2. Rektor Universitas Islam "45" Bekasi;
 3. Sdr. RESKI RAMA DENI.

Lampiran 6 – Hasil Open Coding

HASIL OPEN CODING

NAMA INFORMAN 1	: Dra. SANTI SUKIARTI, M.Si (KEPALA BIDANG BIDANG KOPERASI)
NAMA INFORMAN 2	: Drs. RUSTADI., M. Si (SEKSI PENGEMBANGAN, PEMBIAYAAN DAN PEMASARAN SERTA PROMOSI KOPERASI)
NAMA INFORMAN 3	: PRISTIWANTO, S.E., M.M. (SEKSI KELEMBAGAAN, PERLINDUNGAN DAN PENYULUHAN KOPERASI)
NAMA INFORMAN 4	: SUKARMAN, SE (SEKSI PENILAIAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KOPERASI)
TANGGAL/WAKTU	: 24 Januari 2023 / 10:55
TEMPAT	: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi
PEWAWANCARA	: Reski Rama Deni
TRANSKIP	: Reski Rama Deni
CODING	: Reski Rama Deni

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	N1 : Ngobrol-ngobrol nanya-nanya soal Koperasi Pak Karman P : Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh N : Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh P : Nama saya Reski Rama Deni dari Univeritas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Admnistrasi Negara, Sebelumnya saya pengen tau bu nama ibu bapak bersama jabatan N1 : Saya Nama Dra Santi Sukiarti, M.Si, Jabatan Sebagai Kepala Bidang Koperasi P : Bapak N4 : Nama Saya Sukarman Selaku Koordinator Pengawasan Koperasi N2 : Pak Pris nama N3 : Pris, Kelembagaan N3 : Coba saya liat, Mau bikin skripsi P : Iya mau bikin Skripsi N2 : Nama saya Rustadi, Seperbinaan pengembangan		• Salam • Pembukaan • Perkenalan

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	pemasaran serta promosi kota Bekasi P : Iya N2 : Terus N1 : Pak itu nya pak punten P : pertanyaannya N3 : Ohh.. N2 : ini di wawancarai N3 : Ohh di wawancarai P : Pertanyaannya		
• Memberikan Kegiatan-kegiatan berupa pelatihan dan sosialisasi sesuai Undang-undang	P : Bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM menyalurkan kebijakan koperasi kepada pelaku Koperasi N1 : Bagaimana? P : Bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM menyalurkan kebijakan koperasi kepada pelaku Koperasi N1 : Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa	• Melakukan Kegiatan Pelatihan koperasi • Memfasilitasi Koperasi Sesuai Undang-undang	• Pelatihan • Memfasilitasi • Undang-undang

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	tentang sosialisasi, pelatihan Sesuai dengan. N2 : Memfasilitasi N1 : Memfasilitasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan N1 : Mungkin ada tambahan dari yang lain N2 : ee.. Pak karman?		
• Jumlah anggota masih kurang di banding jumlah koperasi • Tidak ikut campurnya Dinas Koperasi dalam merekrut keanggotaan koperasi • Perekrutan	P : Bagaimana rekrutmen dari Dinas Koperasi dan UMKM dalam memilih SDM yang berkualitas N1 : Buat koperasi? P : Iya N1 : Nah, klo buat koperasi kewenangannya ada di koperasi, karena Koperasi itu di dirikan oleh anggota untuk anggota kan itu ya pak jadi tergantung koperasinya keanggotaan mah,	• Kewenangan ada di koperasi itu sendiri. • Koperasi di dirikan oleh anggota untuk anggota. • Mengusulkan kebutuhan pegawai di bidang koperasi. • Jumlah pegawai sangat kurang • Tidak ikut campur	• Kewenangan ada di koperasi • Badan kepegawaian • SDM • Badan Pelatihan dan Kepegawaian • BKD • TTK • PNS

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
keanggotaan di landasi dengan peraturan Anggaran Dasar Koperasi Bekasi Perekrutan keanggota koperasi melalui Badan Pelatihan Kepengawaaian	P : Kalo buat dinasnya bu bagaimana ? N1 : Kalo di dinas sendirikan ada...bagiannya kita tidak bisa merekrut secara mandiri, karena kita melalui badan kepegawaian. P : Iya P : Tambahan bu N1 : Pak Rustadi N2 : Tambahan ya, biar banyak tuh materinya.. P : Meh seer pak N2 : Berkaitan dengan SDM ada dua ya, yang reski ingin di tanyakan atau yang ingin di peroleh informasi Pertama informasi yang berkaitan denga ee... SDM	dalam hal merekrut keanggotaan	- Mengacu kepada aturan dasar koperasi - PKL

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	bidang koperasi, itu di Dinas Kaitan dengan rekrutmen ee...pegawai bidang koperasi yang di Dinas Koperasi itu sudah di sampaikan oleh Bu Kabin. Kita ini ada di berikan kewenangan lah untuk mengusulkan ya bu ya N1 : emm.. N2 : Mengusulkan kebutuhan pegawai di bidang koperasi, Ini kan pegawai bidang koperasi dari kabin sampai kasis jumlahnya baru 11 bu ya N1 : ya N2 : Memang kalo di lihat dari jumlah, pegawai dengan jumlah koperasi sangat kurang jadi kita mengusulkan tuh ke badan kepegawaian, ehh badan pelatihan dan kepegawaian ya yang dulu mah BKD lah Kota Bekasi, cuman ya ada proses lagi, misalkan dari TKK atau dari PNS ada penerimaan pegawai baru P3K itu banyak tahapannya gitu kan Terus yang kedua berkaitan dengan SDM Gerakan		

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	koperasi nah itu tidak ada istilah rekrutmen, Tidak ada kewenangan Dinas mah karena memang koperasi itu didirikan oleh masyarakat ya, oleh orang-orang yang memang membutuhkan koperasi, jadi tidak ada ikut campur Dinas Koperasi dalam hal rekrutmen kepegawainya atau rekrutmen masalah keanggotaannya cuman mereka melaksanakan rekrutmen keanggotaan itu mengacu kepada aturan yang paling dekat adalah Anggaran Dasar koperasi Bekasi, itu tambahan dari saya N1 : Ada juga satu lagi N2 : Pak Pris N1 : PPKL, PKL apa N4 : P3K N1 Bukan yang P : PKL N2 : itu yang di perbantukan oleh pihak koperasi N1 : Di angkatnya oleh kementrian ya N2 : Ya, Ada 3 orang.		

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
Bentuk komitmen Dinas Koperasi adalah dengan melaksanakan Program Koperasi di tiap tahunnya di dukung oleh APBD Kota Bekasi	P : Lalu, bagaimana Komitment Dinas Koperasi dan UMKM kepada para pelaku koperasi N2 : Komitmen Dinas sudah jelas, Koperasi itu urusan wajib pemeritahan Kabupaten/Kota Bekasi bahwasannya, Bahwa Koperasi termasuk kepada 10 Program PKK jadi di semua wilayah khususnya di kota Bekasi kaitan dengan pembinaan, pengawasan, pengembangan itu merupakan tugas pemerintah Kota Bekasi. Bentuk komitmen, kami tiap tahun mengadakan berbagai kegiatan mengacu kepada program permendagri, ada program yang pertama tentang : Penilaian Kesehatan Koperasi gitu kan ya, yang kedua ada program pengawasan pemeriksaan Koperasi, yang ketiga ada program Ijin Simpan Pinjam, yang ke empat Pendidikan pelatihan koperasi, yang ke lima Pemberdayaan koperasi, itu kan ya Itu bentuk komitmen tuh, kami Dinas Koperasi atau	- Bentuk komitmen Dinas Koperasi dan UMKM adalah mengadakan program tiap tahunnya - Melaksanakan program itu di dukung oleh APBD Kota Bekasi	10 Program PKK - Penilaian Kesehatan Koperasi - Pengawasan Pemeriksaan Koperasi - Ijin Simpan Pinjam - Pendidikan Pelatihan Koperasi - Pemberdayaan Koperasi - APBD - Sertifikasi - Pembinaan

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	Bidang Koperasi tiap tahun melaksanakan hal itu dan di dukung oleh APBD kota Bekasi. Insyaallah tahun 2023 ini anggarannya 846 jt untuk mengimplementasikan komitmen yang tadi ya, N3 :Sertifikasi N2 : Itu kan untuk Pendidikan N3 : Itu juga bentuk komitmen. N2 : Iya N2 : Ada tambahan pak karman N1 : Ya, pembinaan tentang kelembagaan juga sama N4 : Itu untuk pendidikan		tentang Kelembagaan
• Sudah Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan. • Sudah Sesuai SOP.	P : Apakah Dinas Koperasi dan UMKM sudah menjalankan struktur Birokrasi sesuai setandar SOP N3 : Sudah N2 : Yang di Sebut setandar SOP itu apa P : Setandar Operasional Pelayanan N2 : Apakah Dinas Koperasi apa ?	• Sudah Sesuai setandar SOP karena sesuai dengan Nomer Pelatur Dinas • Lebih dulu turun Nomer Pelatur Dinas di banding PP 18	• PP 18 • Peraturan Pemerintahan • Permendagri

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	N4 : Sudah melaksanakan P : Apakah Dinas Koperasi dan UMKM sudah menjalankan struktur Birokrasi sesuai setandar SOP N2 : Jadi gini saya liat yang di maksud dengan struktur itu adalah Nomer Pelatur Dinas kita itu sudah mengacu kepada istilahnya Permendagri atau apa bahwasannya Nama Koperasi kita itu sudah pas yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Tapi ini juga harus di revisi sebenarnya N1 : Ya N2 : Setelah keluar kewenangan PP 18 kalau gak salah Peraturan Pemerintah itu harusnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kita itu harusnya dengan usaha mikro karena kewenangan kita di bidang mikro, tapi PP itu turunnya belakangan duluan Nomer Pelatur kita, namun secara umum Nomer Pelatur kita itu sudah benar N4 : Sesuai SOP N2 : karena di dalamnya apa yang di amatkan di Permendagri tentang program di situ ada kasi kasinya kalo dulu mah bu,		

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	N1 : Ya N2 : Ada kasi pegawasan, kasi pengembangan, kasi kelembagaan itu sudah sesuai ya		
Dinas tidak ikut campur dalam hal keuangan koperasi	P : Bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam manajemen keuangan bagi para pelaku koperasi N2 : Ini harus di luruskan kalo manajemen keuangan sudah urusan teknis manajemen koperasi masing-masing, jadi kita tidak ikut campur dengan keuangan koperasi masing-masing cuman tugas kita adalah membina, memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengurus koperasi kaitan bagaimana mengelola keuangan koperas itu ada materinya manajemen keuangan tapi Dinas koperasi tidak boleh ikut campur kaitan dengan masalah keuangan koperasi karena koperasi itu sebagai perusahaan punya otonomi sendiri dia akan mengelola keuangan	- Dinas Koperasi tidak ikut campur dalam hal keuangan koperasi. - Dinas hanya memberi rambu-rambu dalam manajemen keuangan	- Aplikasi penilaian Kesehatan koperasi - Akuntabel

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	anggota, Cuman kita ngasih rambu-rambu hati-hati dalam mengelola keuangan di kasih pembekalannya bagaimana menyusun laporan keuangan, bagaimana untuk menilai diri sendiri terus di kasih sama pak karman aplikasi penilaian Kesehatan koperasi, rambu-rambu itu sebagai alat pengurus koperasi supaya tau ini koperasi kita ini sehat atau tidak, jadi tidak ada istilah Dinas Koperasi ikut campur dalam penyelolaan keuangan koperasi tidak ada N4 : Karena begini di dalam koperasi itu tetap kita mengacu kepada setandar akutansi jadi semua itu sama dengan perusahaan jadi kita hanya mendorong supaya di jalankan oleh koperasi aturan-aturan sistem akutansinya bagaimana, seperti yang di sampaikan pak rustadi kita ada membudayakan itu sosialisasikan itu semacam tadi pelatihan-pelatihan yang di jalankan oleh Dinas Koperasi selaku Pembina, Saya kira begitu. supaya akuntabel koperasinya artinya setandar pelaporan itu sama dengan yang lain saya akira itu.		

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
• Membuat struktur organisasi • Membuat stuktur kepengurusan koperasi	P : Bagaimana Implementasi Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi N2 : Ini gak ada yang fotoin, fotoin dong kasian N3 : Implementasi P : Bagaimana Implementasi Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi N3 : Kita meningkatkan kelembagaan kita dengan menilai, mengawasi koperasi masing-masing, jadi koperasi itu di awasi sama kita, di nilai oleh kita yak an, dia sehat atau tidak kelembaannya, kalo sehat dia lanjut, kalo engga ya, kita akan priksa, semuanya,	• Mengawasi koperasi • Koperasi hanya mendorong bagaimana supaya tidak ada masalah fisik dan kelembagaannya • Membuat Struktur organisasi supaya koperasi berjalan sebagaimana mestinya • Membuat kepengurusan koperasi • Pengurus koperasi harus mendapatkan SHU yang besar untuk koperasi itu sendiri	• RUPS • Mendapat SHU yang besar • Anggaran dasar • Anggaran Rumah Tangga • Anggota • Pengurus • Pengawas

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	N4 : Jadi gini kalau bicara kelembagaan koperasi itu sebenarnya sudah ada aturan-aturannya di tentukan oleh kementrian koperasi untuk di sampaikan ke pada Gerakan koperasi itu termasuk yang di sampaikan tadi, koperasi itu sudah ada masing-masing setandarnya dasarnya, Anggaran dasar, Anggaran rumah tangga, nah ini termasuk kaitan dengan kelembagaan itu, peraturan persus dan lain-lain itu rasa koperasi sudah punya, kita hanya mendorong bagaimana itu bisa di jalankan oleh koperasinya agar koperasinya tidak ada masalah dari fisik kelembagaannya, karena kelembagaan itu sendiri dikaitkan bagaimana cara merekrut keanggotaan semua termasuk ada di situ, struktur organisasinya, operasional struktur organisasinya nah itu juga kaitan dengan kelembagaan N2 : Jadi begini kaitan kelembagaan koperasi itu ada 3 unsur pertama adalah unsur anggota, pengurus, pengawas unsur-unsur itu di bentuk oleh mereka ketika mereka		

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	sepakat untuk mendirikan koperasi oleh anggota, siapa yang jadi pengurusnya sekertarisnya bendaharanya siapa pengawas juga siapa yang jadi ketua nya anggotanya dan segala macam, jadi kelembagaan koperasi itu merupakan suatu apa ya istilahnya struktur di organisasi koperasi yang di dalamnya itu memang ada tupoksi masing-masing anggota, anggota itu apa si kewajibannya apa haknya, pengurus apa kewanangannya apa tugasnya fungsinya apa, itu kelembagaan itu akan menentukan efektivitas koperasi dalam mencapai tujuannya, itu dalam mensejahterakan anggota jadi kalo di lihat dari strukturnya, anggota itu adanya di rapat anggota, karena rapat anggota itu adalah forum tertinggi di koperasi kalo di perusahaan RUPS (rapat umum pemegang saham) juga ada pengurus di bawahnya , pengurus adalah anggota yang di pilih oleh anggota yang dalam forum rapat anggota untuk mengelola organisasi koperasi, jadi tugas pengurus supaya koperasi itu maju bagaimana, supaya koperasi itu dapat SHU besar bagaimana tujuan akhir		

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	supaya anggota itu sejahtera, bagaimana tugas pengurus kalo pengawas tugasnya untuk memastikan pengurus berkerja sesuai dengan aturan, pengendalian lah, jadi sebagai auditor internal dia yang memeriksa keuangannya, memeriksa pencapaian kinerjanya, target sama realisasi itu, kepatuhannya itu tugas pengawas, kalo ketiga unsur anggota, pengurus, pengawas jalan itu kelembagaan koperasi akan bagus dan akan maju ya, itu mungkin tambahan saya		
Rumusan strategi itu memang ada tapi tiap wilayah cuman ada tahapannya dari bawah dulu terus di akomodir dan jadi sebuah	P : Bagaimana perumusan strategi untuk mencapai tujuan tahunan N2 : Rumusan? P : Iya N2 : Rumusan strategi itu, di kota bekasi, semua wilayah	Rumusan Strategi itu di tiap wilayah memang ada , Mulai dari muslembang terus pokir	- Musrenbang - Pokir - Hasil Rises - Akomodir - LKM - SDM - Renstra - Renja

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
rumusan	Indonesia itu memang ada prosesnya, prosesnya itu mulai dari musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota, jadi kita mengelaraskan nih apa-apa usulan dari bawah dari kelurahan itu juga di kelurahan ada yang di sebut dengan pikir (pokok-pokok pikiran anggota dewan) ada juga hasil rises, jadi program-program kita itu sudah ada dari Kementrian Dalam Negeri, tinggal memperkuatnya dari bawah, ada usulan dari bawah bahkan meminta Pendidikan tentang perkoperasian, ada, terus kita akomobir tuh contohnya tahun ini ada pikir dari partai mana, golkar atau mana ya yang di jati bening, itu untuk mendidik dan membentuk koperasi bagi LKM terus juga ada kota baru pak karman N3 : SDM N2 : untuk memperkuat SDM RT/RW kaitan dengan perkoprasian itu dari bawah usulan, terus kita akomodir jadi perumusan istilahnya rencana dan strategis kita juga lantas ada juga yang disebut denga renstra ada yang di		

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	sebut dengan renja tapi semua itu karna kita mengacu kepada sistem, apa istilahnya partisipatif dari bahwa makanya itu tadi di adakan muslembang terlebih dahulu, muslembang, kelurahan, sebelum di Tarik ke kelurahan di Tarik ke forum RT/RW yang di tanya ngusulin terus tingkat kecamatan baru tingkat kota oleh dewan nanti di paripurnakan, itu prosesnya kita tidak bisa istilahnya membuat suatu rencana itu ya tidak di dasarkan kepada usulan-usulan tadi		
Bisa ada perubahan tapi bisa semena-mena hanya yang bersifat istimewa	P : Apakah terjadi perubahan saat strategi tersebut di rumuskan N2 : Kenapa? P : Apakah terjadi perubahan saat strategi tersebut di rumuskan? N2 : Kalo sudah jadi rensra ya, apa istilahnya bu, udah di	Bisa ada perubahan tapi tidak bisa semena-mena apa lagi sudah jadi dokumen	- APBD - Perubahan - Pokir susulan - Sudah jadi Perda

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	perdakan bu ya N1 : Ya N2 : Kegiatan-kegiatan se Kota Bekasi itu sudah di paripurnakan dan tahun ini juga sudah sah ya bu ya, N1 : Ya N2 : Sudah ada persetujuan dari provinsi N1 : Ya N1 : Tinggal menjalankan N2 : Tinggal menjalankan, tapi walaupun ada penambahan itu juga ada forumnya di N1 : APBD Perubahan N2 : APBD perubahan itu bisa membuka peluang, misalkan ada pokir susulan, biasanya dari anggota dewan ya bu ya N1 : Ya N2 : Menempelkan tuh, itu bisa, tapi perubahan di sini rata-rata perubahan yang sifatnya kalo ada tadi kejadian istimewa lah misalkan tadi anggota dewan, tapi tidak bisa semena-mena dinas tiba-tiba merubah sementara sudah		

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	jadi dokumen sudah jadi perda itu gak bisa		
Semakin Koperasi Akuntabel semakin koperasi di percaya oleh masyarakat.	P : Bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam menetapkan akuntabilitas koperasi N2 : Akuntabilitas? P : Iya N2 : Akuntabilitas ini ada pada tupoksi pak karman nih itu ada kegiatan pada penilaian, pemeriksaan. N4 : Pemeriksaan, dalam meningkatkan akuntabilitas koperasi ini pertama kita juga ada yang nama nya penilaian Kesehatan, dengan ada nya penilaian ini kita tahu sejauh mana sih koperasi berikutnya adalah pemeriksaan, pemeriksaan itu ada beberapa, ada pemeriksaan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan termasuk juga pemeriksaan keuangan nah, ini semua ini	- Dinas mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan tiap tahunnya di antaranya penilaian koperasi, Kepatuhan Koperasi, supaya koperasi akuntabel - Akuntabilitas itu sesuatu yang mutlak yang di miliki oleh koperasi itu sendiri	- Penilaian Kesehatan - Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan - Pemeriksaan Keuangan - Koperasi Sehat - Koperasi Cukup Sehat - Soft Sistem - Hard Sistem - Persus - Aturan Rumah tangga

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	adalah menyangkut akuntabilitas, jika mereka memang koperasinya bisa berjalan mengikuti sesuai dengan ketentuan saya kira koperasi itu ada yang seperti koperasi sehat, kurang sehat, cukup sehat, nah ini atau dalam pengawasan, itu yang bisa saya sampaikan mungkin..Pak Rustadi N2 : Iya N4 : kalo Langkah-langkah kita kesana salah satunya ada sesuai anggaran yang ada, ada sosialisasi tentang Kesehatan, penilaian Kesehatan koperasi tentang kepatuhan karena mereka ini Sebagian masih awam, apasih pemeriksaan, apasih kepatuhan dan lain-lain, itu kita melalui sosialisasi, satu hari dilakukan, supaya mereka ada tambahan ilmu, untuk mengawasi dari pada koperasi itu sendiri. N2 : Jadi masalah akuntabilitas itu memang satu hal yang penting untuk koperasi, karena akuntabilitas itu akan...		

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	N2 : Mengangkat Telpon N2 : Jadi akuntabilitas itu memang sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh koperasi kaitan dengan masalah kepercayaan, semakin akuntabel koperasi itu semakin dipercaya oleh masyarakat, khususnya anggota, makanya fungsi pemerintah ini dari Dinas koperasi tiap tahun ada kegiatan-kegiatan tadi, melaksanakan penilaian koperasi, karena memang kita boleh menilai, untuk khusus kegiatan simpan pinjam, Simpan pinjam itu di perbolehkan, itu juga kita memberikan pemahaman, tentang apa sih yang perlu di lengkapi oleh setiap koperasi kaitan dengan kepatuhan, selain dengan anggaran dasar itu memang koperasi harus dilengkapi dengan sistem-sistem, apa sistemnya itu bersifat soft sistem atau yang sifatnya hard sistem hard sistem itu tadi persus, aturan rumah tangga, itu harus di lengkapi karena aturan itu sebagai dasar aturan main dan memiliki kekuatan hukum di susun oleh anggota dan pengurus berasama-sama , sebagai pijakan pengurus untuk menjalankan koperasi, juga kita		

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	mengarakan setiap koperasi itu harus mempunyai aplikasi seperti tadi soft sistem tadi, karena sistem informasi yang semakin maju dan merupakan tuntutan ini akan menciptakan kepercayaan juga contoh model koperasi Radiatul jannah itu aplikasinya sudah begitu bagus, N4 : Sistemnya N2 : Sistemnya sudah bagus, setiap ada transaksi anggota, anggota pinjam yang bayar nyicil, ada notifikasi terimakasih cicilan anda sudah masuk. Terus juga ada anggota telat bayar misalkan jatuh temponya hari ini kemarin itu ada notifikasi pemberitahuan besok bapak jatuh tempo itu juga kita arahkan itu memang aplikasinya di berikan kebebasan untuk membuat sendiri, di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, itu upaya-upaya kami itu.		
Model-model yang di kembangkan Dinas Koperasi	P : Bagaimana evaluasi Dinas Koperasi dalam mengembangkan model-model strategi dimasa mendatang	Dinas Koperasi sudah ada grand desain yang sifatnya teknis contohnya program	- Grand Design - Bentuk kegiatan, sifatnya teknis

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
Sebenarnya usulan-usulan dari bawah terus di akomodir, asalkan tidak mengggagu	N2 :Ya model-model, Jadi gini ya, semua dinas itu sebenarnya grand desgin nya itu sudah ada di program yang ada dari mentri mentri itu ya, permendagri, ya cuman kita mungkin kita mengkrit nya itu dalam bentuk kegiatannya, sifatnya teknis, tapi program itu sudah ada, yang tadi program Pendidikan pelatihan, program pemeriksaan kepatuhan terus program pemberdayaan, programnya yang grand strateginya sudah ada, cuman kita di tuntutan dalam hal, kegiatannya, itu bisa aja kegiatan itu tadi, mungkin kita akan adaktif dengan usulan tadi dari bawah, ada pikir, itu harus ada yang akomodir, asal tidak penundaan dengan program, kalo masih... masuk di program ya kerjakan,	Pendidikan pelatihan, Program pemeriksaan kepatuhan, Program pemberdayaan	• Pokir • Pendidikan pelatihan • Pemeriksaan kepatuhan • Pemberdayaan
• Memberikan bantuan kepada Koperasi dan UMKM tanpa agunan tanpa	P : Bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kualitas perekonomian yang masih Kurang baik N2 : Perekonomian siapa nih?	• Memberikan bantuan tanpa agunan tanpa bunga untuk meningkat perekonomian masyarakat dan	• Stimulus • Memberi pinjaman tanpa agunan • Mengadakan

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
bunga dan mengadakan program untuk memulihkan Koperasi dan UMKM	P : Kota Bekasi N2 : Jadi kita bicara umum ya, tetap walaupun kita bicara nya umum kita tetap konsen pada koperasi dan UMKM, Upaya-upaya yang sudah kita kerjakan khususnya kemarin dalam menghadapi covid tahun 2020 N3 : 2019 N2 : 2020 lah Bulan Maret, Kota Bekasi itu dalam mempertahankan kondisi ekonomi itu berbagai upaya sudah di lakukan khususnya yang kemaren ada di Dinas Koperasi, Kita Apa istilahnya ya N3 : Stimulus N2 : Stimulus, stimulus untuk Koperasi dan UMKM, itu di berikan pinjaman tanpa Agunan tanpa bunga, itu 4,3M terus Dinas Koperasi juga mengadakan pembelian produk-produk dari UMKM, Yang berkaitan dengan masalah penanganan pencegahan covid misalkan dulu mah belum ada masker kain, UKM Kota Bekasi di suruh	mengadakan program dana bergulir	pembelian produk-produk • Dana bergulir • PDRB Kota Bekasi •

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	bikin masker kain, terus minuman Kesehatan, jahe bubuk, minuman Kesehatan lah untuk pitalitas dari rempah-rempah itu anggarannya 5,7M 2021 untuk pemulihan ekonomi daerah kita juga bikin program dana bergulir, itu di peruntukan untuk Koperasi dan UMKM, ini semua adalah untuk N4 : Meningkatkan perekonomian N2 : Meningkatkan perekonomian, dan sampai saat ini dana bergulirnya jadi contoh sekota Bekasi, Hampir tiap bulan ada dari anggota dewan yang studi banding, jadi pemulihan ekonomi itu ya sebenarnya tiap tahun juga dilakukan dalam meningkatkan ekonomi itu melalui tadi kegiatan-kegiatan, itu bermuara untuk itu semuanya, kita bidang koperasi mengadakan kegiatan dari pendidikannya dari fasilitasnya itu semua untuk meningkatkan ekonomi, ya maka khusus untuk koperasi kontribusinya koperasi di kota Bekasi terhadap PDRB Kota Bekasi, sudah mencapai 0,23%, sudah ratusan milyar, pokoknya pemerintah selalu membuat kegiatan bermuaranya pada bagaimana		

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	meningkatkan ekonomi Kota Bekasi dan para pelaku Usaha Mikro Kota Bekasi, N2 : Ada Tambahan		
• Memberikan kegiatan yang bersifat memajukan Koperasi	P : Bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UMKM Untuk meningkatkan Kepercayaan Masyarakat N2 : Ya Sebenarnya yang meningkatkan kepercayaan masyarakat itu ya kalo di koperasi ya, Sekarang begini tidak ada satu kegiatan di bidang koperasi yang sifatnya melemahkan atau ingin membunuh koperasi tidak ada, semua yang kita lakukan itu kegiatan untuk memajukan koperasi N4 : Meningkatkan Kepercayaan N2 : Nah teknis seterusnya bagaimana masing-masing koperasi tersebut berkerja, masing-masing berkerja itu tadi bagaimana anggotanya di percaya, anggotanya maju,	• Memberikan kegiatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, agar anggotanya dipercaya, anggotanya maju	• Meningkatkan kepercayaan masyarakat • Memberikan kegiatan untuk memajukan koperasi

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	itu tergantung masing-masing koperasi, kalau yang namanya pemeritah tidak ada akan suatu kebijakan yang sifatnya akan, merusak atau membunuh koperasi tidak ada khususnya kota Bekasi semua program kegiatan itu di arahkan untuk memjukan koperasi.		
Meberikan Pengharagaan kepada koperasi dan memberikan ijin membuat aplikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan koperasi	P : Bagaimana tata cara Dinas Koperasi dan UMKM memberikan sistem atau modal bagi para pelaku koperasi N2 : Yang di sebut dengan model atau koperasi itu sudah ada di aturannya N4 : seperti penghargaan koperasi, N2 : Ohh...itu mah untuk, kalo yang di sistem N3 : Sistemnya sendiri N2 : Itu yang tadi, kalo aplikasi yang perubahannya cepet, makanya kota Bekasi dulu, awal-awal dulu 2004 membuat sistem aplikasi, cuman kadang-kadang operasionalnya tidak maksimal, kalo sekarang di serahkan	Memberikan penghargaan kepada koperasi, memberikan sebuah sistem aplikasi	- Sistem - Penghargaan koperasi

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	kemereka aplikasi itu silahkan bikin cari yang termurah sesuaikan dengan kebutuhan, karena selalu berubah, N4 : Cepet berubah sesuai perkembangan N2 : Aplikasi Sudah murah kok		
Pemerintah hanya memberi rambu-rambu untuk menyusun dan mengalokasikan Dana Cadangan	P : Bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM menyusun dan melaksanakan rencana adminitrasi dana cadangan N4 : Dama cadangan N2 : Kalo dana cadangan mah ulah kadiyeu ka koperasi atuh, Jadi gini, dinas koperasi itu tidak ada istilah dana cadangan, semua sudah di rencanakan dan di sahkan oleh	- Dana di urus ole koperasi masing-masing - Bagaimana pengurus memupuk Dana Cadangan berapa persen dari SHU - Tujuan Dana cadangan itu memperkuat ekuitas - Pemerintah hanya	Undang-undang mengatur SHU itu salah satu nya di alokasikan ke Dana Cadangan

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	dewan jadi tidak ada istilah dana cadangan di Dinas mah yang ada dana cadangan itu di koperasi masing-masing ini pasnya di tanyakan kepada pengurus bagaimana, bagaimana pengurus memupuk dana cadangan berapa persen dari SHU N3 : Itu mah langsung menjurus kepada koperasinya N3 : Jadi dateng ke koperasi A, jadi cadangannya buat apa sih, bagaimana pengelolaan cadangan dan lain-lain, disitu ada semua N2 : Karna pemerintah, dengan ini undang-undang, mengatur bahwa SHU itu salah satunya di alokasikan untuk cadangan, itu ada aturannya dari pemerintah, Cuma itu saja, tapi besarannya di sepakati Bersama di koperasi, cuman ada arahan bagi koperasi yang baru itu di ushasakan 20% minimal, karena tujuan cadangan itu adalah untuk memperkuat ekuitas, itu aja bikin rambu-rambu aja pemerintah mah	memberi rambu-rambu	

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
Mengadakan kerjasma untuk memperkuat Koperasi dan UMKM	P : Bagaimana menyusun perjanjian khusus yang menguraikan materi yang diperlukan untuk mengotorisasi dan memperkuat lembaga koperasi N2 : Kaitan dengan perjanjian itu kalo teknis, itu ada di koperasi masing-masing kalo Dinas Koperasi itu tidak ada perjanjian dengan koperasi, karena memperkuat kelembagaan itu sudah menjadi komitmen dan sudah ada di program, di program tadi misalkan, di adakan pedidikan pelatihan. N4 : Mungkin itu menjurusnya ke koperasinya ya N2 : Ya memang itu mah ke koperasinya, itu mah pasnya ke koperasi N4 : Kalo di Dinas itu yang tadi, kalo itu sudah menjurus ke koperasinya N3 : Ini mah ke koperasi semua udah N4 : Artinya perjanjian, kerja sama perjanjian	- Memperkuat kelembagaan itu sudah menjadi komitmen - Kelembagaan berkerjasama dengan perguruan tnggi dan swasta	- Mengadakan Kerjasama dengan perguruan tinggi, swasta dan Lembaga diklat - tripartrit

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	memberikan pinjaman bagaimana N2 : Kalo pun kita disini Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dengan perguruan tinggi dengan kementrian misalnya, kita ada kerja sama dengan setiami ada pks (penjanjian Kerjasama) trisakti, N3 : nah ini nomer 19, 20 nih N2 : Untuk pengembangan koperasi dan UKM, pemerintah dalam hal ini mengadakan Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta, stiami, bansi, dengan Lembaga diklat perkoprasian ada, ada kerja sama nya karna memang, yang menjadi konsen pengembangan koperasi dan UKM itu bukan hanya pemerintah harus ada tripartrit yaitu pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi N3 : Jawaban ini sama ini barusan yang di omongin P : Sudah pak N2 : Alhamdulillah N2 : Sok nyarios deui ka bu kabin P : Terimakasih bu		

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
	P : Maaf ibu nya ngarerepot abi kadiyeu N1 : Teu nanaon, Semoga lancar, Sukses P : Amin N1 : Cepet selesai N2 : Cepet beres P : Aminnnn bu N2 : itu da si ibu na orang Tasik da P : Orang Tasik? N1 : Lain Cimahi N3 : Cimahi N2 : Hahahah P : Tebih ibu Cimahi mah N2 : Hahahah N1 : Lamun ulin teh kadiyeu ka kantor, aya Pak Rustadi, Pak Karman P : Muhun ibu		

HASIL OPEN CODING

NAMA INFORMAN : Winarti (**Ketua Koperasi Wanita Nusa Indah**)
TANGGAL/WAKTU : 17 Januari 2023 / 12:16
TEMPAT : Koperasi Wanita Nusa Indah
PEWAWANCARA : **Reski Rama Deni**
TRANSKIP : **Reski Rama Deni**
CODING : **Reski Rama Deni**

REFLEKSI PENULIS	TRANSKIP	INTISARI	KONSEP
• Hambatannya ada di anggota kadang melebihi dari waktu yang di kasih oleh pihak koperasi	P : Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Reski Rama Deni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara N5 : Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iya dek, Ibu, saya ibu Winarti saya ketua koperasi Nusa Indah Kota Bekasi	• Hambatannya suka ada di anggota • Ekonomi agak susah	• Salam • Pembukaan • Perkenalan • Dikasih jangka waktu

	P : Pertanyaannya P : Hambatan apa saja yang sering terjadi di koperasi saat ini N : Iya N5 : Hambatannya kita suka di anggota ya, anggota kadang kita sudah kasih eeuu... jangka waktu 10 bulan atau setahun, ada yang suka lebih dari waktunya, Kenapa, kita maklumin juga karena masa ekonomi sekarang memang agak susah, apa lagi masa pandemi kemarin iya kan, masa covid gitu, jadi memang agak susah tapi mudah – mudahan tahun ini dan seterusnya, mudah-mudahan tidak ada hambatan lagi di koperasi yang ada di lingkungan kami		
• Kalo permasalahan anggota pihak koperasi yang menangani tapi kalo masalah besar baru minta	P : Ada kah program-program Dinas Koperasi dan UMKM yang bisa menyelesaikan hambatan-hambatan atau permasalahan di koperasi N5 : Kalau yang dari dinas masalah hambatan anggota cukup kita yang nanganin, tapi kalo masalah besar misalnya ada diantaranya bendahara atau menejer yang	• Kalo masalah anggota koperasi yang menanganin • Kalo masalah besar baru minta tolong ke pihak Dinas	• Masalah anggota • Bendahara • Menejer

tolong ke pihak dinas	memang ada niat tidak baik baru kita minta tolong ke Dinas Koperasi, misalnya penyalahgunaan keuangan dan lain lain baru kita minta tolongnya ke dinas, tapi kalau masalah anggota aja kita pengurus yang menangani tidak perlu Dinas		
• Legalitas sudah ada semua sudah ada badan hukum	P : Bagaimana legalitas Koperasi Ini? N5 : Legalitasnya dari mulai dari siup, pdt, dan seterusnya sudah sah sudah ada legalitasnya semuanya, sudah badan hukum sudah semuanya, P : Assalamualaikum ibu	• Legalitas semuanya ada sudah badan hukum semua	• Legalitas • Siup • Pdt

❖ **Wawancara Dinas Koperasi Kota Bekasi**

- Pewawancara (P) dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, mewawancarai beberapa pejabat Dinas Koperasi dan UMKM.
- N1 adalah Dra. Santi Sukiarti, M.Si, Kepala Bidang Koperasi.
- N2 adalah Drs. Rustadi., M.Si, Seksi Pengembangan, Pembiayaan, dan Pemasaran serta Promosi Koperasi.
- N3 adalah Pristiwanto, S.E., M.M., Seksi Kelembagaan, Perlindungan, dan Penyuluhan Koperasi.
- N4 adalah Sukarman, SE, Seksi Penilaian, Pengawasan, dan Penindakan Koperasi.
- Pertanyaan pertama P adalah tentang bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM menyalurkan kebijakan koperasi kepada pelaku koperasi. N1 dan N2 menjelaskan bahwa mereka melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan, serta memfasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pertanyaan kedua P adalah tentang rekrutmen SDM berkualitas dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk koperasi. N1 menjelaskan bahwa koperasi memiliki kewenangan sendiri dalam merekrut anggotanya. Sedangkan untuk Dinas Koperasi dan UMKM, mereka mengusulkan kebutuhan pegawai bidang koperasi ke badan kepegawaian.
- N2 menambahkan bahwa berkaitan dengan SDM di bidang koperasi, ada dua hal yang ingin dijelaskan: (1) rekrutmen pegawai bidang koperasi di Dinas Koperasi sudah dijelaskan oleh Kepala Bidang, dan (2) gerakan koperasi tidak memiliki istilah rekrutmen karena koperasi didirikan oleh masyarakat.
- Pertanyaan mengenai apakah Dinas Koperasi dan UMKM sudah menjalankan struktur birokrasi sesuai SOP, dan N3, N4, dan N2 menyatakan bahwa sudah sesuai dengan SOP.
- N2 sempat bertanya mengenai definisi setandar SOP yang dimaksud.
- Pembicaraan mengenai perubahan nama dari Dinas Koperasi dan UMKM, serta penerapan PP 18 yang berdampak pada kewenangan di bidang mikro.
- Pembicaraan mengenai strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam manajemen keuangan bagi para pelaku koperasi, dan N2 menyatakan bahwa Dinas Koperasi tidak

boleh ikut campur dalam masalah keuangan koperasi, namun memberikan pelatihan mengenai bagaimana mengelola keuangan koperasi.

- Pembicaraan mengenai implementasi strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, dan N3 menyatakan bahwa Dinas Koperasi meningkatkan kelembagaan dengan menilai dan mengawasi koperasi masing-masing.
- N2 dan N4 menjelaskan bahwa akuntabilitas koperasi dapat ditingkatkan melalui penilaian kesehatan koperasi, termasuk pemeriksaan kepatuhan, kelembagaan, dan keuangan.
- Langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas koperasi meliputi sosialisasi tentang kesehatan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, dan peningkatan pemahaman anggota koperasi tentang kepatuhan.
- N2 menjelaskan bahwa akuntabilitas koperasi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
- Dinas Koperasi melakukan evaluasi untuk mengembangkan model-model strategi dalam meningkatkan akuntabilitas koperasi di masa mendatang.
- N2 juga menjelaskan bahwa aplikasi soft sistem atau sistem informasi yang semakin maju dapat membantu meningkatkan akuntabilitas koperasi. Contoh model koperasi Radiatul Jannah disebutkan sebagai contoh aplikasi yang sudah bagus dalam meningkatkan akuntabilitas koperasi.

❖ Dinas Koperasi Kota Bekasi

A) Implementasi Strategi

Komunikasi Eksternal

- Komunikasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi dengan pihak eksternal seperti bapak Seksi Pengembangan sebagai stakeholder berjalan dengan baik.
- Komunikasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi dengan pihak eksternal terutama koperasi primer di Kota Bekasi berjalan dengan baik, jika ada penyaluran kebijakan langsung di adakan sosialisasi.

Komunikasi Internal

- Komunikasi dengan pihak internal dalam merumuskan kebijakan berjalan dengan baik.
- Setiap perumusan kebijakan berjalan dengan baik
- Komunikasi dilakukan dengan cara rapat

Sumber Daya

- Kurangnya jumlah anggota koperasi di banding jumlah koperasi yang ada saat ini
- Perekrutan keanggotaan dilandasi dengan peraturan
- Perekrutan keanggota koperasi melalui Badan Pelatihan Kepegawaian
- Dinas Koperasi dan UMKM tidak ikut campur dalam hal perekrutan anggota koperasi

Sikap Disposisi

- Untuk arahan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM sudah jelas, dengan mengadakan program di tiap tahunnya dan memberikan pengawasan dan pelatihan kepada para pelaku koperasi untuk di nilai kesehatan Koperasinya
- Semua program tersebut sudah menjadi program tahunan Koperasi Kota Bekasi dan di dukung oleh APBD Kota Bekasi
- Program tersebut memang sangat di butuhkan oleh para pelaku Koperasi
- Sikapnya adalah sangat mendukung dan positif seperti memberikan pelatihan kepada para pelaku Koperasi

Struktur Birokrasi

- Struktur birokrasi Dinas Koperasi itu sudah jelas karena sudah sesuai dengan PP 18
- Dinas Koperasi dan UMKM sudah sesuai dengan peraturan karena Nomer Pelatur Dinas sudah sesuai dengan Permendagri tetapi Nomer Pelatur Dinas Koperasi dan UMKM lebih dulu turun di banding PP 18

- Di dalam strukturnya sudah sesuai dengan Permendagri karena di dalamnya ada kepala seksi pengawasan, kepala seksi pengembangan, kepala seksi kelembagaan yang menjadikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi sudah sesuai

B) Strategi

Penerapan tujuan tahunan

- Dalam wawancara & pembicaraan di atas, tujuan tahunan Dinas Koperasi dan UMKM dapat diidentifikasi sebagai meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan akuntabilitas koperasi. Tujuan ini didukung oleh upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan koperasi, pemeriksaan kepatuhan, dan peningkatan pemahaman anggota koperasi tentang kepatuhan. Dalam mencapai tujuan ini, Dinas Koperasi dan UMKM perlu melakukan evaluasi dan mengembangkan model-model strategi yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas koperasi.

Perumusan Kebijakan

- Dari wawancara & pembicaraan di atas, perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM antara lain terkait dengan sosialisasi dan pelatihan, memfasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penilaian kesehatan koperasi, pemeriksaan kepatuhan, dan peningkatan pemahaman anggota koperasi tentang kepatuhan. Dinas Koperasi dan UMKM juga perlu mengembangkan model-model strategi yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas koperasi di masa mendatang. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM perlu memastikan bahwa struktur birokrasi yang dijalankan sesuai dengan SOP.
- ***Memotivasi***
Dalam mencapai tujuan tahunan dan menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan, Dinas Koperasi dan UMKM dapat memotivasi para pejabat dan pegawai yang bekerja

di dalamnya dengan memberikan penghargaan dan insentif atas kinerja yang baik.

Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM dapat melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menentukan siapa yang berhak menerima penghargaan dan insentif.

- ***Alokasi Sumber daya***

Untuk mencapai tujuan tahunan dan menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan, Dinas Koperasi dan UMKM perlu mengalokasikan sumber daya yang tepat, baik itu dalam hal SDM maupun anggaran. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM dapat memprioritaskan pengembangan SDM dalam bidang koperasi dan mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan koperasi. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas koperasi, seperti penerapan sistem informasi yang semakin maju.

- ❖ **Wawancara Ketua Koperasi**

- Pewawancara (P) memperkenalkan diri dan bertanya kepada Winarti (N5), Ketua Koperasi Wanita Nusa Indah, tentang hambatan yang sering terjadi di koperasi.
- N5 menjawab bahwa hambatannya sering terjadi pada anggota yang lambat dalam membayar pinjaman, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti pandemi.
- P bertanya tentang program Dinas Koperasi dan UMKM yang dapat membantu menyelesaikan hambatan di koperasi.
- N5 menjelaskan bahwa koperasi dapat menangani masalah anggota, tetapi jika ada masalah yang lebih besar, seperti penyalahgunaan keuangan, mereka dapat meminta bantuan dari Dinas Koperasi.
- P bertanya tentang legalitas koperasi.
- N5 menjelaskan bahwa koperasi sudah memiliki legalitas dan badan hukum yang sah.

Kualitas Kelembagaan Koperasi Wanita Nusa Indah

- Berdasarkan poin-poin tersebut, kualitas kelembagaan koperasi N5 terlihat cukup baik. Hal ini terlihat dari responsifnya N5 dalam menjawab pertanyaan dan kemampuannya untuk mengatasi masalah anggota dengan baik. Selain itu, N5 juga mengetahui tentang program Dinas Koperasi dan UMKM yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang lebih besar. Terakhir, koperasi N5 sudah memiliki legalitas dan badan hukum yang sah, menunjukkan bahwa koperasi ini telah beroperasi secara resmi dan sah di mata hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa koperasi N5 memiliki kualitas kelembagaan yang baik.

Implementasi Strategi Dinas Koperasi Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi

Analisis implementasi strategi dan kualitas kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi dari beberapa poin yang telah disediakan dapat dilihat dari perspektif komunikasi eksternal, komunikasi internal, sumber daya, sikap disposisi, struktur birokrasi, dan strategi. Dalam hal komunikasi eksternal, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi telah melakukan komunikasi dengan stakeholder seperti bapak Seksi Pengembangan dan koperasi primer di Kota Bekasi dengan baik, terutama jika ada penyaluran kebijakan langsung diadakan sosialisasi. Komunikasi internal dalam merumuskan kebijakan juga berjalan dengan baik, di mana setiap perumusan kebijakan dilakukan dengan cara rapat. Dalam hal sumber daya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi perlu meningkatkan jumlah anggota koperasi dibanding jumlah koperasi yang ada saat ini, tetapi perekrutan anggota dilakukan dengan peraturan dan melalui Badan Pelatihan Kepegawaian, yang memastikan Dinas Koperasi dan UMKM tidak ikut campur dalam hal perekrutan anggota koperasi. Sikap disposisi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi terhadap para pelaku koperasi sangat mendukung dan positif, dengan mengadakan program di tiap tahunnya dan memberikan pengawasan dan pelatihan kepada para pelaku koperasi untuk dinilai kesehatan koperasinya. Struktur birokrasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi sudah sesuai dengan peraturan karena nomor pelatur Dinas sudah sesuai dengan Permendagri, tetapi nomor pelatur Dinas Koperasi dan UMKM lebih dulu turun dibanding PP 18, di dalam strukturnya sudah sesuai dengan Permendagri karena di dalamnya ada kepala seksi pengawasan, kepala seksi pengembangan, kepala seksi kelembagaan yang menjadikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi sudah sesuai.

Dalam hal strategi, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi telah memiliki tujuan tahunan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan akuntabilitas koperasi, yang didukung oleh upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan koperasi, pemeriksaan kepatuhan, dan peningkatan pemahaman anggota koperasi tentang kepatuhan. Dalam mencapai tujuan ini, Dinas Koperasi dan UMKM perlu melakukan evaluasi dan mengembangkan model-model strategi yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas koperasi. Perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM antara lain terkait dengan sosialisasi dan pelatihan, memfasilitasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, penilaian kesehatan koperasi, pemeriksaan kepatuhan, dan peningkatan pemahaman anggota koperasi tentang kepatuhan. Dinas Koperasi dan UMKM juga perlu mengembangkan model-model strategi yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas koperasi di masa mendatang. Perumusan kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas antara lain terkait dengan sosialisasi dan pelatihan, memfasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penilaian kesehatan koperasi, pemeriksaan kepatuhan, dan peningkatan pemahaman anggota koperasi tentang kepatuhan. Dalam memotivasi para pegawai, Dinas memberikan penghargaan dan insentif atas kinerja yang baik serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Dinas juga mengalokasikan sumber daya yang tepat, baik dalam hal SDM maupun anggaran, dengan memprioritaskan pengembangan SDM dalam bidang koperasi dan mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan koperasi. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi telah berhasil dalam implementasi strategi dan kualitas kelembagaan. Namun, masih perlu terus ditingkatkan dalam beberapa aspek tertentu agar lebih optimal.

Kendala-Kendala Yang Menghambat Implementasi Strategi Dinas Koperasi Dalam Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Berdasarkan informasi yang diberikan, terdapat beberapa kendala yang menghambat implementasi strategi Dinas Koperasi dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi. Beberapa kendala tersebut antara lain:

- Komunikasi eksternal yang tidak efektif dengan koperasi primer di Kota Bekasi. Meskipun komunikasi dengan stakeholder lainnya berjalan dengan baik, namun komunikasi dengan koperasi primer membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif.
- Kurangnya jumlah anggota koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada saat ini. Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya perekrutan anggota koperasi yang lebih efektif.
- Dinas Koperasi dan UMKM tidak ikut campur dalam hal perekrutan anggota koperasi. Hal ini dapat menghambat upaya perekrutan anggota koperasi yang lebih

efektif. Meskipun struktur birokrasi Dinas Koperasi sudah sesuai dengan peraturan, namun masih terdapat kebingungan mengenai nomor pelatur Dinas Koperasi dan UMKM yang lebih dulu turun dibandingkan PP 18.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Dinas Koperasi dapat mengambil beberapa strategi, di antaranya:

- Penerapan tujuan tahunan yang jelas dan terukur. Hal ini dapat membantu Dinas Koperasi dalam fokus pada tujuan yang ingin dicapai dan mengembangkan model-model strategi yang efektif.
- Perumusan kebijakan yang lebih efektif, terutama terkait dengan sosialisasi dan pelatihan, memfasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penilaian kesehatan koperasi, pemeriksaan kepatuhan, dan peningkatan pemahaman anggota koperasi tentang kepatuhan.
- Memotivasi para pejabat dan pegawai yang bekerja di Dinas Koperasi dengan memberikan penghargaan dan insentif atas kinerja yang baik.
- Mengalokasikan sumber daya yang tepat, baik itu dalam hal SDM maupun anggaran, untuk mencapai tujuan tahunan dan menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan. Hal ini dapat membantu Dinas Koperasi dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Lampiran 9 - Hasil Dokumentasi Penelitian